

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Achmad dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Arief, Didik M. Mansur, dkk, 2009, *Cyber law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II. Bandung: Refika Aditama.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia ; Kajian Konstektual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakhiriah, Efa Laela, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariri, Wawan Muhwari, 2011, *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/daftar-penyelenggara-sertifikasi-elektronik-psre-indonesia>, diakses tanggal 12 April 2025
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Makarim, Edmom, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Surabaya: Yuridika.
- Mertokusomo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo

Partodihardjo, Soemarno, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Pramono, Widyo, 2007, *Cybercrimes dan Pencegahannya* , Jakarta: Kencana,

Prodjodikoro, Wirjono, 2005, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Puspa ,Van Pramodya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

R. Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Saliman, Abdul Rasyid, dkk, 2007, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. III, Jakarta: Kencana

Samudra, Teguh, 1992 *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Almunir.

Sitompul, dkk, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa

Susanti, Dyah Ochtorna, dkk, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, H. Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. III, Jakarta: Kencana.

Usman, R. 2021, *Cyber Law: Konsep, Teori dan Implementasi Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 165

Waluyo, Bambang, 1992 *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiebe, Rick, 2002, *Yuridiksi, Seminar E-Commerce and the Law*, Bandung: Citra Aditya.

B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzeine Inlansch Regleme

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400, Jakarta;

C. Jurnal :

Juanda, H. Enju, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, 2016

Junior Associate KJD Law Firm, Vol 29 No 1, Januari-April 2014.

Sitepu, Rehulina, *Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce*, Doktrina: Journal of Law, 1 April 2018

Syita, Kunti Kalma, *Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang NO 30 TAHUN 1999*.

Wibowo, Arrianto Mukti, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999.

D. Daring :

KEMENKUMHAM, 2008, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Suatu Perjanjian, Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online*, ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pada pukul 21.00 WIB.

KEMENKUMHAM, 2008, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pada pukul 21.00 WIB

Kriswangsa Bagus Kusuma Yudha, 2017, *50 Kata- Kata Motivasi Tokoh Terkenal Dunia Dalam Meraih Mimpi*, <https://www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-tokoh-terkenal-dunia/amp/>. diakses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 15.37 WIB.

DIGITAL SIGNATURE, <http://www.wikipedia.org/digitalsignature>. , diakses pada tanggal 15 september 2020, pada pukul 01;45 WIB.

Eka Fitri Hidayati, 2020, *Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html> diakses pada tanggal 19 januari 2020, pukul 21.25 WIB.